

## ABSTRAK

### Deska Juliana

Pengadaan barang/jasa untuk kepentingan pemerintah merupakan salah satu alat untuk menggerakkan roda perekonomian, oleh karenanya penyerapan anggaran melalui pengadaan barang/jasa ini menjadi sangat penting.

Permasalahannya adalah pengaturan terhadap penetapan keputusan lelang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, pertanggungjawaban atas tidak dilaksanakannya kontrak terhadap pemenang lelang dalam peraturan perundang-undangan serta pertimbangan hakim atas sengketa lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/PDT/2018

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. "Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Disimpulkan bahwa Pengaturan terhadap penetapan keputusan lelang yang sesuai dengan aturan perundang-undangan risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Penjualan lelang yang tidak tercatat dalam berita acara lelang tidak memberikan kepastian hukum dan bertentangan dengan fungsi pelayanan penegak hukum. Berita acara lelang memuat semua peristiwa yang terjadi dalam prosesi penjualan barang. Berdasarkan teori tanggung jawab, KPKNL bertanggung jawab terhadap kerugian pemenang lelang akibat dari tidak dilaksanakannya kontrak. Selain itu, pihak bank juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul akibat dari tidak dilaksanakannya kontrak yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut baik itu kerugian materiil dan imateriil. Pertimbangan hakim atas sengketa lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 389 K/PDT/2018 terhadap alasan-alasan PK Mahkamah Agung berpendapat: bahwa alasan-alasan PK tidak dapat dibenarkan oleh karena memori PK dan kontra memori PK dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak ditemukan adanya kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK tersebut harus ditolak.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Pengadaan.

## **ABSTRACT**

### **Deska Juliana**

Procurement of goods/services for the benefit of the government is one of the tools to move the wheels of the economy, therefore the absorption of the budget through the procurement of goods/services is very important.

The problem is the regulation regarding the determination of auction decisions in accordance with statutory regulations, accountability for non-performance of the contract against the winning bidder in statutory regulations and the judge's consideration of auction disputes in the Supreme Court decision Number 389 K/PDT/2018

This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, to complete the data is done by collecting relevant materials and conducting literature studies where the data will then be analyzed juridically.

It is concluded that the regulation regarding the stipulation of auction decisions in accordance with statutory rules and minutes of the auction is the minutes of the implementation of the auction made by the auction official which is an authentic deed and has perfect evidentiary power. Auction sales that are not recorded in the minutes of the auction do not provide legal certainty and are contrary to the function of law enforcement services. The minutes of the auction contain all the events that occurred in the procession of selling goods. Based on the theory of responsibility, the KPKNL is responsible for the loss of the auction winner as a result of the non-performance of the contract. In addition, the bank is also responsible for losses arising from non-performance of contracts which are the result of unlawful acts, both material and immaterial losses. The judge's consideration of the auction dispute in the Supreme Court decision No. 389 K/PDT/2018 regarding the reasons for PK The Supreme Court is of the opinion: that PK's reasons cannot be justified because PK's memory and PK's contra memory are linked to Judex Facti and Judex Juris decisions, If there is no judge's mistake or obvious mistake from Judex Juris based on the above considerations, then the PK application submitted by the PK Petitioner must be rejected.

Keywords: Unlawful Acts, Auctions, Procurement